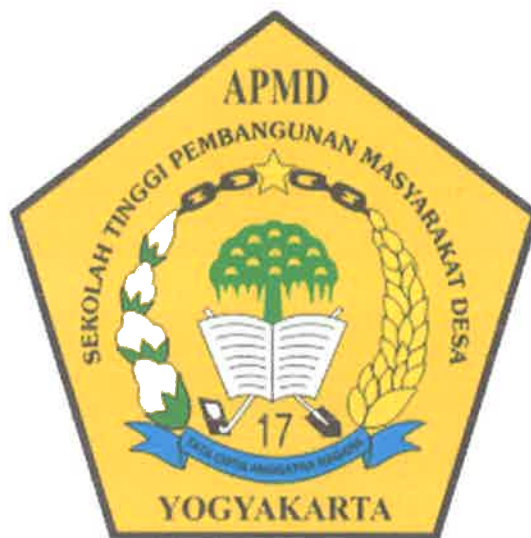


**KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TERHADAP TOKO TITIPAN UNTUK
PENGEMBANGAN USAHA RUMAHAN**

DI DESA NGRUNDUL KABUPATEN KLATEN

SKRIPSI



Disusun Oleh :

MARTYS PAULUS NOTATEMA GULO

NIM : 17520097

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2022



**KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PEMBUATAN TOKO TITIPAN
UNTUK PENGEMBANGAN USAHA RUMAHAN
DI DESA NGRUNDUL, KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG PROGRAM STUDI STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dipertahankan di depan Tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar serjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Senin

Tanggal : 7 Februari 2022

Jam : 11.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

NAMA

TANDA TANGAN

Drs. Suharyanto, M.M

Ketua /Pembimbing

Dra. Sri Utami M.Si

Penguji I

Fatih Gama Abisano N, S.IP.MA

Penguji II

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S-1)

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Martys Paulus Notatema Gulo

Nim : 17520097

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PEMBUATAN TOKO TITIPAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA RUMAHAN DI DESA NGRUNDUL, KABUPATEN KLATEN”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang telah dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Yogyakarta, 14 Februari 2022

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH' vertically on the left, '10000' in large numbers, and 'METERAI TEMPEL' with the serial number '4F3AJX664977235' at the bottom.

Martys Paulus Notatema Gulo

INTISARI

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana proses terlaksananya kebijakan pemerintah terhadap pengembangan usaha rumahan di Desa Ngrundul, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Jawa Tengah yang mana didalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Desa berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan melihat bagaimana situasi masyarakat terutama para pelaku usaha yang mana masih banyak yang belum terdaftar sebagai pelaku usaha resmi yang terdaftar sesuai dengan yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat baik berupa uang tunai maupun dalam segi barang atau lain nya. Pemerintah Desa Ngrundul mengambil tindakan sebagai pelayanan dan respon terhadap aspirasi masyarakat dengan membuat toko titipan yang dikelola oleh ibu-ibu PKK dengan memfasilitasi toko tersebut dengan ruko milik Desa serta isi dari ruko tersebut seperti etalase dan meja serta kursi untuk membantu memasarkan hasil produksi usaha rumahan milik masyarakat Desa Ngrundul dan semua pelaku usaha tersebut dapat menitipkan hasil produksinya tanpa syarat untuk menambah penjualan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan obyek penelitian kebijakan pemerintah desa terhadap pengembangan usaha rumahan di Desa Ngrundul. Teknik penentuan dalam pengambilan informan yaitu *purposive* dengan total 8 informan yang terdiri dari Kepala Desa, dan juga beberapa toko masyarakat serta masyarakat Desa Ngrundul dan pelaku usaha rumahan. Kemudian dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik Pengamatan (*Observasi*), Wawancara (*Interview*), dan juga Dokumentasi. Serta dalam teknik analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan Pemerintah Desa Ngrundul terhadap pengembangan usaha rumahan dengan membuat toko titipan merupakan tindakan nyata pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat dengan melihat potensi dan keinginan masyarakat Desa Ngrundul, serta mengambil keputusan bersama dengan melibatkan semua pihak untuk merumuskan kebijakan dengan mengundang berbagai lapisan masyarakat. Dengan adanya toko titipan tersebut sangat membantu dan meningkatkan pemasaran hasil produksi usaha rumahan masyarakat dan bisa berjalan karna kerjasama dan antusias masyarakat Desa Ngrundul yang sangat besar.

Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Desa, Usaha Rumahan

MOTO

Bermimpilah dan jangan pernah takut untuk menaklukan masa depan

(Martys Paulus Notatema Gulo)

A Youth Not Wasted

(Yohanes Yuda Rici Atmoko)

Menjadi hidup itu menyenangkan

(Bagus Bayu Irawan)

Kerberuntungan akan menghampiri orang yang bergerak

(Amrizal Pramudya)

Jangan hidup miskin kalau mau dipandang orang

(Leonard F. Hia)

Selalu berdamai dengan keadaan

(Erwin S.)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya maka saya dapat menyelesaikan skripsi ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Kepada kedua orangtua tercinta ayah saya Emanpatie Gulo dan ibu saya Ferimawati Halawa yang telah bersusah payah memberikan yang terbaik untuk saya tanpa pamrih baik itu doa maupun dukungan dengan penuh kesabaran dan senyum diwajah.
2. Untuk saudara-saudara saya dan adik-adik saya , adik saya Besta, Berthafati, Jevan, dan yolanda yang selalu mendorong dan mendukung saya untuk terus meraih harapan-harapan saya dengan penuh kasih dan perhatian serta canda tawa. . Saya berharapnya kalian mendapatkan hal yang lebih dari pencapaian saya saat ini.
3. Untuk abang-abang saya baik kepada Nesta, Elvan yang telah senantiasa mendukung serta memberi wejangan kepada saya dalam menggapai semua harapan.
4. Untuk teman seperjuangan saya baik kepada Mega Rns, Shransky, Iyan, Besta, Igo, Nota, Rinto, Eko Aryando, Alex, Albert yang telah bersama-sama dengan saya waktu di Medan dan di Nias.
5. Untuk seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan dan arahan untuk saya untuk menjadi orang yang berguna kedepannya.
6. Untuk kawan-kawan saya dan keluarga saya yang bersama-sama dengan saya di kota Jogja baik aldin, Leo, Berkat, Naldo, Erwin, Verlin, Ano, Raimond, Elman, Putri, Iren, Yuli, Titus, Percis, Vince, Fendri, jessica halawa dan kawan-kawan daerah Nias yang telah menjadi berkat untuk saya.

7. Untuk kakak senior saya Sastra Lahagu dan Besta Lahagu, Aldin Waruwu yang telah menghantarkan saya dan mengenal kota Jogja dengan begitu banyak ilmu-ilmu dan pelajaran yang tentunya sangat berguna nantinya untuk masa depan saya.
8. Untuk kawan-kawan saya yang telah bersama-sama dengan saya di Jogja dan berjuang bersama mencapai cita-cita baik kepada Bagus Taher, Rizal Bgl, Rici Subur, Yosua Cemal, Keceng, Muhamat Ozi, Uswatun, Rizqan, Susan, Laras, Tama, Marisa, Rizal Kamarulah, Rendy, Alam, Ikmal, Ilyas, Ryzki, Aldo, Shyabana terimakasih untuk semuanya.
9. Teruntuk almamater kampus terbaik STPMD “APMD” Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “ KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TERHADAP TOKO TITIPAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA RUMAHAN “ skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis dapatkan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kemudian tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan izin penelitian untuk penulis;
3. Ibu Dra. Sri Utami, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, petunjuk, bimbingan dan arahan selama penulis belajar di STPMD “APMD” Yogyakarta;
4. Bapak Drs. Suharyanto, M.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak kritik dan saran demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini;

5. Penguji I Dra. Sri Utami M.Si
6. Penguji II Fatih Gama Abisono N. S.IP.MA
7. Bapak dan ibu dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah mengajar, mendidik dan membagikan ilmunya kepada penulis. Terima kasih atas semua ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan. Semoga penulis dapat mengamalkan dan mempergunakan ilmunya dengan baik;
8. Pihak Pemerintah Desa Ngrundul Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
9. Kepala Desa Ngrundul Bapak Wahyu Widyanarko dan seluruh masyarakat yang tidak bisa disebutkan satu per-satu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga atas kerja samanya sehingga dapat membantu peneliti dalam memberikan data-data yang dibutuhkan.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga mohon masukan untuk lebih baiknya skripsi ini.

Yogyakarta, 14 Januari 2022

Penulis



Martys Paulus Notatema Gulo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara sebagai suatu organisasi publik selain mempunyai tujuan yang harus direalisasikan, juga mempunyai berbagai permasalahan yang harus diatasi. pemerintah sebagai alat negara mempunyai peranan penting dalam pemecahan permasalahan publik secara efektif dan efisien, maka dengan itu mensyaratkan adanya proses perumusan masalah dan penetapan kebijakan. Kebijakan publik umumnya ditetapkan oleh pihak pemerintah untuk kebutuhan masyarakat. Level kebijakan pemerintah bisa berada di tingkat umum, tingkat pelaksanaan, dan tingkat teknis. Rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Kebijakan dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan sektor kelompok swasta, serta individu.

Kebijakan publik umumnya disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum kebijakan publik disusun dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bersama (Nugroho 2009). Kebijakan publik dilaksanakan oleh administrator negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah sebagai bentuk pelayanan publik baik dalam bentuk barang dan jasa, maupun pelayanan administrasi yang menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh negara untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Undang-undang pelayanan publik No. 25 Tahun 2009 menyebut pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu setiap institusi penyelenggara negara,

korporasi, dan lembaga independen yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik (pasal 1 angka 1 dan 2).

Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Hal ini bahwa Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara memberikan insentif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, Pengembangan lembaga modal ventura (venture capital company) Pelembagaan terhadap transaksi anjak (pengalihan/pembelian) piutang.

Selain investasi awal yang relatif kecil dan mudah dilakukan, pemerintah indonesia sangat memperhatikan perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) karna diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan mengurangi angka pengangguran di indonesia. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik ditingkat desa mempunyai otonomi

dan kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan publik, baik berupa layanan yang disiapkan dan dikelola sendiri, maupun berupa program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Pemerintah desa merupakan kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Di dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat, yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Proses pembuatan kebijakan pelayanan publik di tingkat desa, tertuang dalam peraturan desa (perdes), peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Pemerintah desa dalam menjalankan dan menyelenggarakan pemerintahan desa seperti halnya yang tertuang dalam undang-undang salah satunya mengurus kepentingan masyarakat dengan membuat kebijakan pelayanan yang bisa memajukan masyarakat desa baik dalam segala aspek salah satunya aspek ekonomi. Di masa sekarang masyarakat banyak menggantungkan mata pencarian dengan membuka usaha dalam segala bidang dan salah satunya usaha rumahan yang banyak digeluti oleh masyarakat, dengan adanya campur tangan dan dukungan pemerintah desa akan sangat membantu masyarakat serta mendorong ekonomi desa setempat.

Usaha rumahan atau lebih dikenal dengan industri rumah tangga sebagai bagian dari usaha kecil menengah (UKM) yang terus berkembang dan populer dikalangan semua masyarakat indonesia. Ternyata perkembangan usaha rumahan saat ini menjadi salah satu penunjang perekonomian di indonesia, karena ada sekitar 40 juta pengusaha kecil menengah di seluruh indonesia. Sementara itu jumlah pengusaha di indonesia ada 40 juta, itu artinya 99% pengusaha di indonesia adalah pengusaha kecil menengah yang tidak lain yaitu pelaku

usaha rumahan. Usaha rumahan merupakan usaha yang dijalankan dari rumah. Sebagian atau seluruh kegiatannya bisa saja dilakukan diluar rumah, tetapi pusat dari kegiatan itu tetap dijalankan dari rumah. Ada banyak keuntungan bekerja dirumah, selain tidak harus memikirkan biaya sewa tempat, usaha ini bisa tumbuh dan menjadi tidak sekedar usaha sampingan jika dilakukan dengan serius, usaha rumahan bisa menjadi tumpuan hidup keluarga.

Bantuan dari pemerintah terhadap pelaku usaha UMKM sangat berdampak dan membantu para pelaku usaha dikalangan masyarakat diseluruh indonesia yang bertujuan memajukan perekonomian bangsa dan masyarakat. Desa Ngrundul merupakan salah satu desa yang memiliki program pengembangan usaha rumahan melalui kebijakan pemerintah desa. Pengembangan usaha rumahan ini bertujuan sebagai bentuk bantuan dari pemerintah terhadap pelaku usaha UMKM untuk membantu para pelaku usaha dikalangan masyarakat di desa Ngrundul. Peran pemerintah desa Ngrundul dalam memfasilitasi serta mendukung kegiatan produksi usaha rumahan masyarakat memiliki peran penting dalam peningkatan kemampuan masyarakat baik dalam bentuk produksi sampai pada proses pemasaran. Desa Ngrundul memiliki program bantuan pemerintah desa terhadap pelaku usaha rumahan yang dimulai pada tahun 2019. Dukungan pemerintah desa Ngrundul tidak terlepas dari banyaknya kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha yang masih belum terdaftar sebagai UMKM yang sah secara hukum karna belum memiliki NPWP usaha sehingga tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah secara langsung.

Dalam proses pengembangan usaha rumahan, ketersediaan bahan baku menjadi faktor yang paling penting untuk diperhatikan. Di desa Ngrundul sendiri masih mengalami masalah ketersediaan bahan baku salah contoh yaitu usaha kerajinan seperti kerajinan kemoceng.

Kelangkaan bahan baku menjadi kendala dalam proses produksi hal ini disebabkan oleh tingginya angka permintaan dan juga di desa Ngrundul sendiri kebanyakan masih mencari bahan baku dari luar desa. Selain usaha kemoceng, usaha rumahan lainnya ketersediaan bahan baku cukup stabil karena bahan bakunya masih tersedia di desa Ngrundul sendiri dan cukup mudah untuk didapatkan seperti usaha keripik yang bahan bakunya terbuat dari umbi-umbian yang masih dikategorikan mudah untuk didapatkan dari hasil pertanian masyarakat desa Ngrundul sendiri.

Kegiatan memproduksi dan mengembangkan usaha, sumber daya manusia sangat perlu diperhatikan sehingga menghasilkan hasil produksi yang berkualitas. Hal inipun tidak luput dari perhatian pemerintah desa Ngrundul, untuk mencapai produksi yang berkualitas pemberdayaan dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan menjadi prioritas pemerintah desa untuk membantu pelaku usaha rumahan sehingga menghasilkan produksi yang berkualitas. Pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Ngrundul dilakukan dengan harapan membantu perekonomian masyarakat terlebih bagi pelaku usaha itu sendiri. Namun dalam produksinya, usaha rumahan di desa Ngrundul masih tergolong kecil, hal itu dikarenakan pemasaran usaha tersebut masih dalam lingkup lokal dan belum mampu bersaing dikancah nasional maupun internasional dan masih kalah saing dengan beberapa desa-desa lainya di kabupaten Klaten. Untuk itu, bantuan pemerintah desa Ngrundul sangat diperlukan, memanfaatkan berbagai media maupun *stakeholder* menjadi faktor penting.

Salah satu kebijakan pemerintah desa Ngrundul dalam membantu pemasaran hasil usaha rumahan masyarakat desa Ngrundul yaitu dengan dibentuknya toko titipan yang

dikelola oleh organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pelaku usaha rumahan bisa menyalurkan hasil produk usahanya ke toko titipan. Toko titipan yang dikelola oleh PKK tersebut menjadi jembatan dalam proses pemasaran sehingga memperoleh kemudahan bagi para peminat atau konsumen untuk memilih berbagai produk hasil dari usaha rumahan masyarakat desa Ngrundul. Namun, toko titipan tersebut harus berhenti beroperasi akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Hal itu membuat proses pemasaran dan promosi hasil usaha rumahan masyarakat desa Ngrundul mengalami kemerosotan, pemerintah desa Ngrundul sendiri belum bisa melakukan tindakan untuk membantu pelaku usaha untuk mendapatkan konsumen dan memasarkan produknya.

Kabupaten Klaten terkenal dengan desa-desa yang memiliki potensi hasil kerajinan termasuk salah satunya desa Ngrundul. Banyaknya pelaku usaha kerajinan dari berbagai desa di kabupaten Klaten menuntut kreatifitas masyarakat dan kemampuan pemerintah desa sebagai aktor pemberdayaan masyarakat agar produk yang dihasilkan mampu bersaing dan membantu perekonomian masyarakat desa. Untuk mendapatkan pasar yang lebih luas dan produk yang dihasilkan banyak diminati konsumen faktor kualitas dan pemasaran sangat penting, dibutuhkan kreatifitas baik dalam bentuk produk maupun kreatifitas dalam pemasaran. Namun, hal itu bukan hal mudah untuk dilakukan, sumber daya manusia, ketersediaan bahan baku, variasi produk yang masih terbatas seringkali menjadi faktor penghambat pengembangan produksi usaha rumahan masyarakat desa Ngrundul. Untuk itu, kebijakan pemerintah desa Ngrindul diharapkan dapat membantu permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha rumahan sehingga masyarakat dapat terus berkembang dan menghasilkan produk yang berkualitas.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha rumahan di desa Ngrundul, kecamatan Kebonarom, Klaten, Jawa Tengah, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Pengembangan Usaha Rumahan di Desa Ngrundul, Kabupaten Klaten”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang belakang di atas dirumuskannya sebagai berikut: **“Bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Toko Titipan Untuk Pengembangan Usaha Rumahan di Desa Ngrundul, Kabupaten Klaten”**.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah desa terhadap pengembangan usaha rumahan di desa Ngrundul. Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan usaha rumahan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini di harapkan dapat berguna antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai perbandingan antara teori yang didapatkan dibangku perkuliahan dan dengan fakta yang ada di lapangan.
 - b. Hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai acuan dibidang yang sejenis untuk melaksanakan penelitian yang lebih mendalam.
 - c. Sebagai bahan masukan dan pembelajaran bagi mahasiswa dan dosen.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi Desa dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi.
- b. Sebagai bahan pertimbangan untuk diterapkan dalam Desa yang selanjutnya agar menjadi lebih baik.
- c. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan umum tentang kebijakan pemerintah desa dalam mengembangkan usaha rumahan.

E. Literatur Riview

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan kebijakan pemerintah desa terhadap usaha rumahan. Hal ini didasarkan karena penelitian ini mengangkat topik bagaimana kebijakan pemerintah desa terhadap pengembangan usaha rumahan sebagai topik penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam menentukan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mafrohah, Aini (2019) bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerdayaan dan pengelolaan Untuk mengetahui bagaimana efektifitas usaha rumahan (home industri) pengasapan ikan dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi masyarakat sebelum dibuatkan sentra pengasapan terpadu masih kurang kondusif untuk melakukan aktifitas produksi. Tujuan awal dibentuknya sentra pengolahan ikan asap agar masyarakat lebih sejahtera karena melihat banyaknya masyarakat Wonosari yang memiliki usaha pengolahan ikan asap tetapi belum sepenuhnya terarah. Setelah ada proses pemberdayaan, ada beberapa perubahan yang dialami oleh para anggota. Yang paling dirasakan oleh para anggota adalah pendapatan yang diterima.

Perubahan itu dirasakan setelah memulai usaha ikan asap. contohnya saja, dulu para anggota berjualan ikan asap mengendarai sepeda, namun sekarang bisa membeli sepeda motor atau bahkan ada yang sudah sanggup membeli mobil untuk membawa dagangan mereka. Hal ini membuktikan bahwa pemberdayaan yang ada di sentra pengasapan ikan sudah memenuhi salah satu indikator pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sculer, Hashemi dan Riley yaitu kemampuan membeli komoditas besar dan kecil.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tyas, Wido Prananing., Sianturi, Onixtin O., H, Julius Kevin P. (2020) bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendukung dalam pengembangan UMKM industri berbasis rumah (HBE) sebagai peningkatan pendapatan pelaku usaha. Melalui analisis ini, dapat dilihat identifikasi kebijakan pendukung dalam berkembangnya usaha. Penelitian dengan pendekatan restropektif belum pernah dilakukan dalam mengkaji kebijakan dan program penerapan UMKM di berbagai kota. Oleh karena itu, studi kebijakan pendukung kebijakan dan program 5 kota ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam proses evaluasi kebijakan dan program yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dapat dilihat dari adanya pengembangan usaha dan keunggulan kompetitif UKM yang dilakukan oleh pemerintah untuk pengembangan usaha logam yang cukup baik, dikarenakan kegiatan fasilitasi berupa pengembangan sarana produksi, pelatihan, dan pemasaran sudah terpenuhi. Dengan adanya implementasi kebijakan tersebut, kerajinan logam mengalami perkembangan sehingga mempengaruhi keberlangsungan usaha.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh M. Oki Octavian AR (2019) bertujuan untuk Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Strategi Bersaing dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah diKecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

kebijakan pemerintah masih belum berperan secara optimal. penyebabnya karena kurangnya informasi yang di dapat oleh para pelaku usaha tentang kebijakan-kebijakan tersebut dan dukungan lembaga terkait seperti pelatihan-pelatihan yang selama ini diberikan belum merata masih, banyak daerah yang belum mendapatkan pelatihan serta informasi mengenai pangsa pasar dan modal masih kurang didapatkan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Adelia Utami , Sriati, Yunindyawati (2019) bertujuan untuk melihat seberapa besar tingkat peran pendamping yang bertujuan mendampingi pelaku IR, sehingga tujuan dari program yang diharapkan dapat tercapai. Seberapa jauh tujuan program tersebut dapat tercapai mencerminkan hasil kerja yang mendorong pelaku IR untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh program pemberdayaan perempuan, karena pendamping merupakan kunci dari masyarakat tersebut untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan. Ife (2008) mengatakan bahwa pendamping harus memahami kompleksitas partisipasi, cara yang diperjuangkan dan tujuan yang berbeda yang hendak dicapai. Oleh karena itu penting dilakukan pengukuran tingkat partisipasi pelaku IR dalam program pemberdayaan perempuan yang dilakukan, serta melihat hubungan antara peran pendamping dengan partisipasi pelaku IR dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan berbasis Industri Rumahan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kapasitas Penyuluh di Provinsi Lampung berada pada katagori sedang, demikian pula kepuasan petani dalam kegiatan penyuluhan juga pada katagori sedang. Tingkat kapasitas penyuluh berhubungan sangat nyata dengan kepuasan petani terhadap kegiatan penyuluhan dengan nilai $R_s = 0,323$. Hal ini juga berarti bahwa pelaksanaan peran penyuluh dalam melaksanakan tupoksinya berhubungan dengan kepuasan petani yang pada akhirnya mempengaruhi partisipasinya dalam kegiatan penyuluhan. positif dengan tingkat

partisipasi pelaku Industri Rumahan , dengan nilai koefisien korelasi $R_s=0,62$ signifikan pada $\alpha = 0,05$.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhlis Hajar Adiputra (2020) bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pembinaan usaha kecil menengah khususnya kelompok usaha pandai besi di Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah kelompok usaha pandai besi di Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, pembinaan kelompok usaha dalam meningkatkan sumber daya manusia, dengan melakukan pendampingan dan memberikan bantuan fasilitas. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam melakukan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat namun secara aplikatif serta hasil yang dicapai pasca pelaksanaan pembinaan melalui kegiatan pelatihan, magang atau studi banding, pendampingan dan pemberian bantuan peralatan produksi belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal

Jadi, disini saya melakukan penelitian hampir sama dengan penelitian terdahulu, namun pengembangan usaha rumahan pada penelitian saya saat ini tentang kebijakan, yaitu kebijakan pemerintah desa terhadap pengembangan usaha rumahan dalam mengelola dan memasarkan produk dari masyarakat setempat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Ngrundul Kabupaten Klaten. sehingga kami dan para pembaca bisa membedakan letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kami.

F. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan dapat dipahami sebagai rangkaian program, tindakan, aktivitas ataupun sikap yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Menurut James Anderson kebijakan merupakan langkah tindakan yang secara tindakan dilakukan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenan dengan adanya masalah atau personal tertentu yang dihadapi (Anderson, 1994:5.Public Policy). Dalam buku analisis kebijakan (Solichin 2016:9) lebih lanjut didefinisikan secara luas oleh lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana.

Istilah kebijakan saat ini kemudian lebih banyak dipahami sebagai tindakan atau kegiatan dalam kategori pemerintah atau negara yang dilakukan oleh sekelompok aktor pemerintah yang kemudian ter-*framing* bahwa kebijakan merupakan tindakan politis oleh aktor pengambil keputusan. Hal ini kemudian, kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan politik (*political action*). Knoepfel dan kawan-kawan (2007) dalam buku Public Policy mempertegas arti kebijakan sebagai serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang diantara berbagai aktor, baik

publik/pemerintah maupun privat/swasta yang terlibat berbagai cara dalam respon, mendefinisikan sebagai masalah publik (Solichin, 2016:10).

Menurut Thoha kebijakan dibagi menjadi dua aspek (Thoha, 2012), yakni:

- a. Kebijakan merupakan praktik sosial: kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan suatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktik kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
- b. Kebijakan adalah suatu respon atau peristiwa yang terjadi: baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atau tindakan bersama bagi pihak-pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Dengan demikian kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan ataupun kegiatan terstruktur dan terencana akibat suatu kondisi tertentu yang kemudian diputuskan oleh aktor-aktor pengambil keputusan baik pemerintah atau swasta untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

a. Proses Perumusan Kebijakan

Dalam prosesnya kebijakan publik harus melalui proses manajemen untuk mencapai sebuah rumusan hingga pada tahap hasil kebijakan. Prosesnya dapat digeneralisir sebagai berikut:

a. Masalah kebijakan

adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan publik.

b. Perumusan kebijakan

adalah pengembangan kebijakan yang efektif dan dapat diterima untuk mengatasi masalah apa yang telah ditempatkan dalam agenda kebijakan

c. Implementasi kebijakan

adalah proses yang mengubah strategi dan rencana menjadi tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis.

d. Evaluasi kebijakan

merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan.

Manajemen kebijakan publik tersebut merupakan poin terpenting dalam pencapaian hasil dari kebijakan tersebut. Hal itu kemudian dirumuskan oleh Riant Nugroho dalam bukunya *Public Policy*, proses kebijakan publik dari ilmu manajemen berkenaan dengan lima tahap (Riant Nugroho, 2017:534) sebagai berikut:

a. *Planing*: tahap ketika kebijakan direncanakan untuk dibuat. Pekerjaannya meliputi penyusunan rencana untuk membuat suatu kebijakan dengan cara:

1) Menemu-kenali isu kebijakan untuk dijadikan agenda kebijakan, membuat perencanaan; 2) Menyiapkan metode pembuatan kebijakan; 3) Memilih dan menetapkan tim perumus; 4) Mempersiapkan segenap kebutuhan untuk pembuatan kebijakan, termasuk SOP pembuat kebijakan

b. *Formulating*: tahap ketika kebijakan dirumuskan dan ditetapkan pekerjaannya adalah memproses pembuatan (perumusan) kebijakan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat, termasuk di dalamnya:

- 1) Analisis sensitivitas; 2) Manajemen resiko; 3) Strategi pelaksanaan, kepemimpinan, dan pengendalian kebijakan
- c. *Implementing*: tahap ketika kebijakan dilaksanakan melalui organisasi yang ada atau yang akan dibuat. Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan cara:
- 1) Menyiapkan organisasi pelaksana; 2) Menyiapkan manusia pelaksana; 3) Menyiapkan prosedur pelaksana kebijakan (*Governance, modality*).
- d. *Leading*: kebijakan publik harus dipimpin. Kebijakan publik adalah *urusan pemimpin*, bukan urusan *staf*, sehingga pemimpin harus memimpin sendiri pelaksanaan kebijakan dengan cara:
- 1) Menyiapkan tupoksi bagi setiap pemimpin disetiap jenjang; 2) Menyiapkan teknik penggerakan (motivasi) untuk melaksanakan kebijakan.
- e. *Controlling*: kebijakan publik harus dikendalikan agar tidak “liar” pekerjaan pengendalian kebijakan dilakukan pada saat implementasi atau pelaksanaan kebijakan, selesai pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Kegiatan meliputi:
- 1) Pemantauan; 2) Evaluasi; 3) Pengganjaran.

2. Peran Pemerintah Desa Terhadap Pengembangan Usaha Rumahan

Kebijakan publik dalam skala pemerintah desa telah diatur dan termuat dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat, kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) di beri kewenangan membuat kebijakan dalam bentuk peraturan desa (Perdes), peraturan bersama kepala Desa. Perdes

adalah peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD.

Perdes memuat materi berupa:

1) Kewenangan yang telah ada berdasarkan hak asal-usul desa; 2) Kewenangan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan di atasnya sebagai urusan desa; 3) Penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan (medebewind); 4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada kepala desa (Huda, 2015).

Pemerintah desa bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan dan strategi yang tepat untuk pengembangan usaha masyarakat dalam skala desa. Seperti diketahui bahwa UMKM diskala desa sangat beragam salah satunya usaha rumahan (*home industri*). Usaha rumahan merupakan salah satu potensi di desa untuk terus dikembangkan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa apabila mendapatkan pengawasan dan pendampingan yang tepat dari pemerintah.

3. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan tidak mempunyai pengertian model tunggal. Pemberdayaan dipahami sangat berbeda menurut cara pandang orang maupun konteks kelembagaan, politik, dan sosialbudayanya. Ada yang memahami pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Ada pihak lain yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan

suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas. Ada juga yang memahami pemberdayaan secara makro sebagai upaya mengurangi ketidakmerataan dengan memperluas kemampuan manusia (melalui, misalnya, pendidikan dasar umum dan pemeliharaan kesehatan, bersama dengan perencanaan yang cukup memadai bagi perlindungan masyarakat) dan memperbaiki distribusi modal-modal yang nyata (misal lahan dan akses terhadap modal). Berdasarkan hal itu maka inti dari pemberdayaan adalah:

1) Suatu upaya atau proses pembangunan yang berkesinambungan, yang berarti dilaksanakan secara terorganisir, dan bertahap dimulai dari tahap permulaan hingga tahap kegiatan tindaklanjut dan evaluasi (follow-up activity and evaluation); 2) Suatu upaya atau proses memperbaiki (to improve) kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik; 3) Suatu upaya atau proses menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga prinsip *to help the community to help themselves* dapat menjadi kenyataan; 4) Suatu upaya atau proses memandirikan masyarakat, dengan cara menggalang partisipasi aktif dalam masyarakat berupa bentuk aksi bersama (group action) di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Jadi, pemberdayaan masyarakat desa dapat dipahami dengan beberapa cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan,

perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara given. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Kedua, titik pijak pemberdayaan adalah kekuasaan (power), sebagai jawaban atas ketidakberdayaan (powerless) masyarakat. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini berasumsi bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak berubah atau tidak dapat diubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian diatas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi, kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. 4 Dengan pemahaman kekuasaan seperti itu, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: (1) bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun; dan (2) bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis (Edi Suharto, 2005).

Ketiga, pemberdayaan terbentang dari proses sampai visi ideal. Dari sisi proses, masyarakat sebagai subyek melakukan tindakan atau gerakan secara kolektif mengembangkan potensi-kreasi, memperkuat posisi tawar, dan meraih kedaulatan. Dari sisi visi ideal, proses tersebut hendak mencapai suatu kondisi dimana masyarakat mempunyai

kemampuan dan kemandirian melakukan voice, akses dan kontrol terhadap lingkungan, komunitas, sumberdaya dan relasi sosial-politik dengan negara. Proses untuk mencapai visi ideal tersebut harus tumbuh dari bawah dan dari dalam masyarakat sendiri. Namun, masalahnya, dalam kondisi struktural yang timpang masyarakat sulit sekali membangun kekuatan dari dalam dan dari bawah, sehingga membutuhkan “intervensi” dari luar. Hadirnya pihak luar (pemerintah, NGOs, organisasi masyarakat sipil, organisasi agama, perguruan tinggi, dan lain-lain) ke komunitas bukanlah mendikte, menggurui, atau menentukan, melainkan bertindak sebagai fasilitator (katalisator) yang memudahkan, menggerakkan, mengorganisir, menghubungkan, memberi ruang, mendorong, membangkitkan dan seterusnya. Hubungan antara komunitas dengan pihak luar itu bersifat setara, saling percaya, saling menghormati, terbuka, serta saling belajar untuk tumbuh berkembang secara bersama-sama.

Keempat, pemberdayaan terbentang dari level psikologis-personal (anggota masyarakat) sampai ke level struktural masyarakat secara kolektif. Sasaran pemberdayaan adalah masyarakat, yang di dalamnya mewadahi warga secara individual maupun komunitas secara kolektif. Pemberdayaan adalah upaya membangkitkan kekuatan dan potensi masyarakat yang bertumpu pada komunitas lokal melalui pendekatan partisipatif dan belajar bersama. Dari sisi strategi, pendekatan dan proses, pemberdayaan merupakan gerakan dan pendekatan berbasis masyarakat lokal maupun bertumpu pada kapasitas lokal, yang notabene bisa dimasukkan ke dalam kerangka pembaharuan menuju kemandirian masyarakat. Dasar pemikiran pemberdayaan masyarakat adalah memajukan kemampuan masyarakat desa untuk mengelola secara mandiri urusan komunitasnya. Dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, UU Desa menempatkan kesepakatan bersama seluruh

warga desa sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola kewenangannya untuk mengurus dan mengatur Desa.

Dengan demikian Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan publik. Dengan demikian, dalam pemberdayaan masyarakat ditekankan adanya keutamaan politik. Politik dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini merupakan transformasi politik ke dalam tindakan nyata, khususnya demokrasi hadir dalam hidup sehari-hari. Melalui penerapan demokrasi musyawarah mufakat setiap warga desa berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai konteks hidupnya masing-masing. Dengan demikian, demokrasi memberi ruang bagi anggota masyarakat dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Keempat, pemberdayaan terbentang dari level psikologis-personal (anggota masyarakat) sampai ke level struktural masyarakat secara kolektif. Sasaran pemberdayaan adalah masyarakat, yang di dalamnya mewadahi warga secara individual maupun komunitas secara kolektif. Pemberdayaan adalah upaya membangkitkan kekuatan dan potensi masyarakat yang bertumpu pada komunitas lokal melalui pendekatan partisipatif dan belajar bersama. Dari sisi strategi, pendekatan dan proses, pemberdayaan merupakan gerakan dan pendekatan berbasis masyarakat lokal maupun bertumpu pada kapasitas lokal, yang notabene bisa dimasukkan ke dalam kerangka pembaharuan menuju kemandirian masyarakat. Dasar pemikiran pemberdayaan masyarakat adalah memajukan kemampuan masyarakat desa untuk mengelola secara mandiri urusan komunitasnya. Dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, UU Desa menempatkan kesepakatan bersama seluruh

warga desa sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola kewenangannya untuk mengurus dan mengatur Desa.

Dengan demikian Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan publik. Dengan demikian, dalam pemberdayaan masyarakat ditekankan adanya keutamaan politik. Politik dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini merupakan transformasi politik ke dalam tindakan nyata, khususnya demokrasi hadir dalam hidup sehari-hari. Melalui penerapan demokrasi musyawarah mufakat setiap warga desa berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai konteks hidupnya masing-masing. Dengan demikian, demokrasi memberi ruang bagi anggota masyarakat dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka.

G. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksud pada kebijakan pemerintah desa terhadap pengembangan usaha rumahan di Desa Ngrundul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Hal ini untuk mengetahui capaian kebijakan pemerintah desa Ngrundul terhadap pengembangan usaha rumahan dengan aspek-aspek yang dikaji meliputi :

1. Kebijakan Pemerintah desa dalam pengembangan usaha rumahan di desa Ngrundul.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan usaha rumahan Di Desa Ngrundul.

H. Metode Penelitian

Data yang akan peneliti kumpulkan adalah data primer dimana data yang dikumpulkan adalah data yang langsung didapat pada saat penelitian di lapangan berupa dokumentasi dan wawancara. Pengumpulan data didefinisikan sebagai suatu proses

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Desa Ngrundul Kelurahan merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif ini biasanya dilakukan terhadap satu variabel yang diteliti dengan mencoba menguraikan secara rinci yang sesuai dengan masalah penelitian yang diinginkan. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai karakteristik suatu populasi atau fenomena tertentu.

Pada umumnya penelitian deskriptif menggunakan survei sebagai metode pengumpulan data melalui survei memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Informasi yang diperoleh dari sekumpulan orang-orang yang dipercayai
2. Informasi yang diperoleh dari sekumpulan orang-orang tersebut merupakan sampel.
3. Informasi yang diperoleh melalui bertanya dengan beberapa pernyataan.

Dalam laporan penelitian data yang penulis sajikan berupa naskah wawancara , catatan lapangan, dan dokumentasi resmi lainnya. Sedangkan untuk pengolahan dan penyajian data peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan statistik. Sedangkan menurut (Sarwono 2006: 194), dalam penelitian kualitatif peneliti berbaur menjadi satu dengan yang diteliti itu sendiri. Sasaran utama penelitian kualitatif ialah manusia karena manusia lah sumber masalah dan sekaligus penyelesai masalah. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan social dari perspektif partisipan.

Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisa terhadap kenyataan social yang menjadi focus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.

Peneliti berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif dapat lebih menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang dapat menggambarkan suatu fenomena sehingga lebih sistematis. Fenomena tersebut baik berupa bentuk, aktifitas, karakteristik, perubahan, hubungan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2016: 224-225), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai seting, berbagai sumber, dan berbagai cara.

Berdasarkan diatas bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara) dan dokumentasi.

a. Metode Wawancara

Yang saya lakukan sebagai peneliti di Desa Ngrundul dalam konteks metode wawancara yaitu dengan mendatangi narasumber yang berkaitan dengan judul dan fokus penelitian dengan melakukan tanya jawab tentang Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Pengembangan Usaha Rumah di Desa Ngrundul.

b. Metode Observasi/Pengamatan

Dalam melakukan metode observasi/pengamatan peneliti mendatangi tempat penelitian di Desa Ngrundul sebelum melakukan penelitian untuk mengetahui situasi di tempat penelitian sekaligus meminta izin kepada pemerintah Desa Ngrundul untuk melaksanakan penelitian dengan menunjukan topik atau judul penelitian yang akan dilakukan di Desa Ngrundul.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi saya sebagai peneliti melakukan dokumentasi terhadap setiap yang saya lakukan dalam penelitian untuk menjadikan dokumentasi tersebut sebagai bukti nya dan dasar pernyataan terkait penelitian yang saya lakukan di Desa Ngrundul sekaligus menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

3. Unit Analisis

- Lokasi penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Desa Ngrundul Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten.

- Obyek penelitian

Obyek penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Pengembangan UsahaRumahan

- Subjek penelitian

Tabel 1.1

Deskripsi informan berdasarkan status jabatan

No	Nama	Pendidikan	Usia	Jabatan
1.	Wahyu Widyanarko	S2	53	Kepala Desa Ngrundul
2.	Y.Seva Kusumarinto	S1	50	Sekretaris Desa Ngrudul
3.	Sri Mawarni	SMA	49	Ketua PKK
4.	Etri Puji Pahayu	S1	39	Bendahara PKK/Pelaku usaha
5.	Suyati	SMA	45	Pelaku Usaha
6.	Sri Rejeki	SMA	40	Pelaku Usaha
7.	Santoso	SLTA	62	Konsumen
8	Yohanes Haryana	S1	59	BPD

*Sumber Data Primer :Desa Ngrundul 2021***a. Komposisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

Tabel 1.2

Komposisi narasumber berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	Laki-laki	4
2.	Perempuan	4
Jumlah		8

Sumber Data : Desa Ngrundul 2021

Berdasarkan data yang ada pada tabel diatas maka dapat disimpulkan pemilihan informan yang didominasi oleh jenis kelamin perempuan bukanlah salah satu bentuk

deskriminasi, pemilihan informan yang mayoritas jenis kelamin perempuan dianggap tepat karena dominasi perempuan dalam kegiatan program pengembangan usaha rumahan yang ada di Desa Ngrundul. selain itu pemilihan informan yang mayoritas berjenis perempuan juga dianggap tepat karena mayoritas laki-laki kurang memahami situasi dan kondisi yang terjadi dalam kegiatan program pengembangan usaha rumahan yang ada di Desa Ngrundul. dengan demikian diharapkan data yang diperoleh sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

b. Deskripsi Informan Berdasarkan Usia

Deskripsi informan berdasarkan usia perlu dijelaskan untuk mengetahui tingkat pengalaman dan pola pikir informan yang berkaitan dengan pernyataan yang diberikan. Selain itu tingginya usia seseorang juga sering dikaitkan dengan semakin banyaknya pengalaman yang telah didapat, oleh sebab itu biasanya orang yang berusia tinggi seringkali menjadi contoh bagi orang-orang yang berusia dibawahnya. Adapun deskripsi informan berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Berdasarkan data yang ada pada diatas, menunjukan bahwa informan berdasarkan usia yang terbanyak adalah berusia 41-60 tahun. Hal ini disebabkan karena dalam kegiatan program yang ada di Desa Ngrundul kaum dewasa memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan yang ada . akan tetapi dibalik itu ada peran kaum pemuda yang membantu dalam menjalankan kegiatan untuk bekal masa mendatang.

c. Deskripsi Informan Berdasarkan Pendidikan

Pada umumnya responden memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Dengan pendidikan yang tinggi, diharapkan responden mampu memberikan informasi yang

benar dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan berkaitan dengan kegiatan program yang ada di Desa Ngrundul.

Disamping itu diharapkan para responden dapat menyumbangkan pemikiran dan gagasan yang bijak dalam setiap tindakan dan keputusan yang akan diambil dan dilaksanakan guna kepentingan bersama. Hal ini berlaku bagi masyarakat Desa Ngrundul untuk dapat membawa Desa Ngrundul ke arah yang lebih maju dan hal ini harus membutuhkan masyarakat yang memiliki kualitas yang memadai, guna untuk memberikan ide-ide dan inovasi untuk kemajuan Desa.

Adapun deskripsi informan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Berdasarkan data yang ada pada diatas dapat disimpulkan bahwa informan-informan yang peneliti pilih adalah 50% dari Pemerintah Desa Ngrundul dan 50% lagi merupakan masyarakat Desa Ngrundul yang mengelola kegiatan program pengembangan usaha rumahan. Keputusan ini diambil oleh peneliti dengan tujuan agar informasi yang diperoleh tidak didominasi oleh informasi Pemerintah Desa Ngrundul dan selain itu juga mendapat informasi dari masyarakat Desa Ngrundul. dengan demikian informasi yang diperoleh bisa sesuai.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dilakukan bertujuan untuk mencari jawaban mengenai kebijakan pemerintah desa terhadap pengembangan usaha rumahan. Dalam melakukan analisis data atau mengolah data dapat melalui langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal pokok, mencari tema dan pola, kemungkinan memfokuskan pada hal yang dianggap penting. Data yang sudah direduksi akan mempermudah dalam pengumpulan data karena data tersebut akan memberikan gambaran yang jelas (Sugiyono, 2013: 26).

Disini peneliti akan mengumpulkan data dari informan yang sudah ditentukan setelah itu akan melakukan pemilahan-pemilahan data terkait dengan fokus penelitian yang akan dilakukan.

b. Penyajian Data

Setelah melewati tahap reduksi data kemudian data akan didisplay, penyajian data secara tekstual (*naratif*) atau dapat juga berupa tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Dengan adanya proses penyajian data ini akan lebih terorganisasi atau rapi dan memberikan kemudahan untuk memahami data yang ditemukan. Dengan teknik ini data hasil penelitian akan ditampilkan dalam berbagai bentuk penyajian data berupa buku agar mudah dalam membaca dan mencermati dalam isi penelitian ini.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir setelah melakukan penyajian data, peneliti akan menganalisis data yang telah ditemukan dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan yang sudah dilakukan.

BAB II

PROFIL DESA NGRUNDUL

A. Kondisi Geografis

1. Pembagian Wilayah

Luas wilayah Desa Ngrundul berdasarkan data monografinya yaitu ada 1.882.940 Ha. Yang mana luas tersebut digunakan dalam beberapa peruntukan yakni : Tanah Sawah 453.920Ha, Tanah Pekarangan 453.250Ha, Lain-lain(Jalan, sungai, dan makam) 11.292Ha.

Desa Ngrundul juga merupakan jalur alternatif lintas Boyolali dan banyak dilewati pengendara sehingga desa Ngrundul yang merupakan wilayah pertanian tidak menutup kemungkinan menjadi wilayah industri dikarenakan juga masyarakat desa Ngrundul yang mayoritas sebagai pelaku usaha rumahan.

Kemudian berdasarkan data dan realitis yang ada secara administratif Desa Ngrundul terdiri dari 9 padukuhan yang kemudian terdiri dari 12 rukun warga(RW) dan juga 32 rukun tetangga(RT). Kemudian 9 padukuhan tersebut diantaranya yakni :

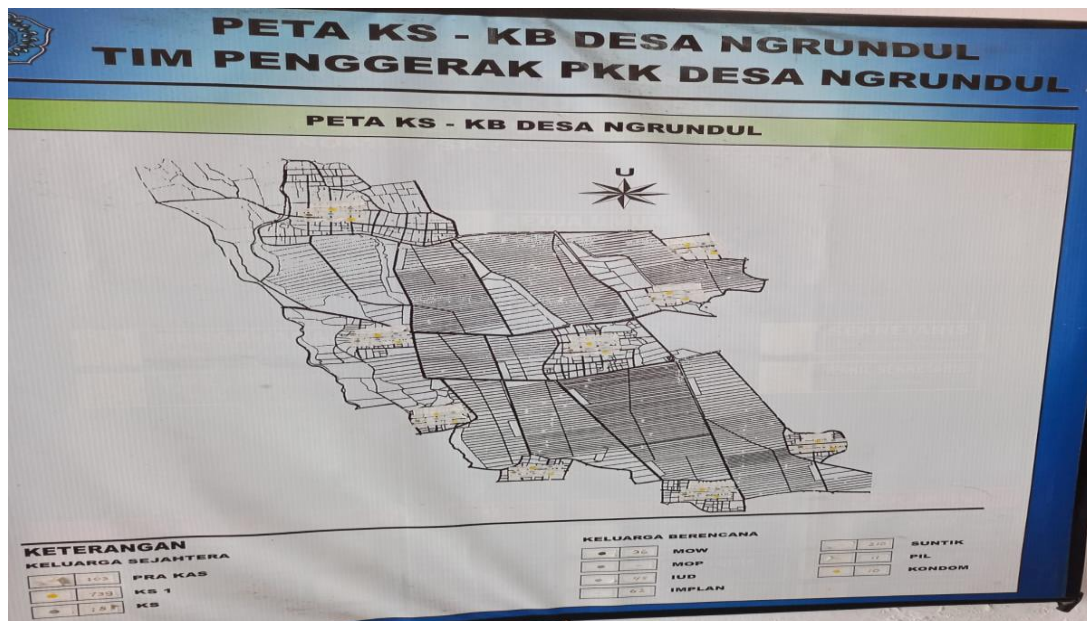
1. Dukuh Ketonggo
2. Dukuh Kauman
3. Dukuh Krosok
4. Dukuh Jetis
5. Dukuh Satriyan
6. Dukuh Satriyan
7. Dukuh Ngriman

8. Dukuh Ngrundul
9. Dukuh Ngrundul
10. Dukuh Ngrundul
11. Dukuh Jetak
12. Dukuh Guling
13. Dukuh Ngrundul

2. Batas Wilayah

Desa Ngrundul merupakan salah satu dari 7 Desa yang ada di Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten. Yang memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- a. Utara : Desa Demak ijo
- b. Timur : Desa Nglinggi
- c. Selatan : Desa Mijiwan dan Desa Pluneng
- d. Barat : Desa Karanglo



3. Keadaan Iklim Tanah dan Air

Desa Ngrundul merupakan sebuah desa dengan ketinggian di antara 100 hingga 200 meter diatas permukaan laut (mdpl). Keadaan iklim di Desa Ngrundul termasuk iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur udara rata-rata 27-33 derajat Celcius dan kecepatan angin rata-rata sekitar 153 milimeter setiap bulannya. Dengan curah hujan tertinggi yaitu 1.500-2.000 mm/thn dan, sedangkan keadaan tanah di Desa Ngrundul ini adalah tanah liat sehingga cocok untuk pertanian.

B. Kondisi Demografi

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang menduduki suatu desa merupakan salah satu modal dasar dan utama ketika dalam pembangunan suatu desa tersebut. Penduduk yang memiliki berbagai macam potensi di berbagai bidang yang kemudian dapat dibina, diarahkan dan juga dimanfaatkan sebagai tenaga kerja guna memajukan desa dalam berbagai bidang. Hingga sampai saat ini jumlah Kepala Keluarga(KK) di Desa Ngrundul ada 1.339 KK.

2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.1 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-Laki	1.854
2	Perempuan	1.964
Total		3.818

Sumber Data monografi Desa Ngrundul Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia

Sesuai dengan data monografi yang ada di Desa Manjung bahwa jumlah atau komposisi penduduk setempat dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Kelompok Usia	Jumlah (Jiwa)
1	0-4 tahun	183
2	5-9 tahun	251
3	10-14 tahun	260
4	15- 19 tahun	238
5	20-24 tahun	235
6	25-29 tahun	299
7	30 tahun keatas	2.352
Total		3.818

Sumber Data Monografi Desa Ngrundul Tahun 2021

Berdasarkan rincian tabel diatas dapat diketahui bahwa kelompok usia umur 30 tahun keatas paling banyak atau mendominan dan kemudian diikuti kelompok usia umur 25-29 tahun yang menandakan bahwa usia lanjut lebihlah mendominasi di wilayah Desa Ndrundul.

4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dalam usahanya meningkatkan kecerdasan serta pola pikir masyarakatnya, pendidikan merupakan faktor utama dalam proses perkembangannya. Pola pikir maupun perkembangan intelektual seseorang dapat dipupuk dengan menempuh pendidikan setinggi dan sebanyak mungkin yang dalam artian, semakin tingginya intelektual serta pola pikir seseorang dapat diharapkan dapat membantu diri sendiri dalam kehidupan serta lingkungan disekitarnya. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pendidikan di Desa Ngrundul dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	749
2	Belum Tamat Sekolah Dasar/Sederajat	683
3	Tamat SD/Sederajat	819
4	SLTP/Sederajat	620
5	SLTA/Sederajat	101
6	Diploma I/II	21
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	96
8	Diploma IV/Strata I	111
9	Strata II	9
Jumlah		3.109

Sumber Data Monografi Desa Ngrundul Tahun 2021

Berdasarkan rincian tabel diatas dapat dilihat bahwa tamatan Sekolah Dasar(SD)/Sederajat merupakan yang paling mendominasi yaitu sebanyak 819 orang baru, setelah itu Tidak/Belum Sekolah yakni sebanyak 749 orang, yang artinya tingkat pendidikan

yang ada di Desa Ngrundul bisa dikatakan masihlah rendah, terlebih lagi Indonesia saat ini mewajibkan aturan wajib belajar 12 tahun.

5. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama

Sesuai dengan data monografi di Desa Ngrundul bahwa berdasarkan agama komposisi penduduk dapat dikomposisikan sebagai berikut :

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2.251
2	Kristen	849
3	Katholik	581
4	Hindu	137
Jumlah		3.818

Sumber Data monografi Desa Ngrundul Tahun 2021

Dari tabel diatas jelas dapat dilihat bahwa Islam merupakan agama mayoritas yang ada di Desa Ngrundul, yang kemudian diikuti oleh Kristen, Katholik dan juga hindu. Sedangkan agama lain seperti budha, konghuchu belum ada di desa tersebut. Akan tetapi dalam berbagai perbedaan tersebut masyarakat Desa Manjung tetap hidup berdampingan dengan rukun.

C. Kondisi Ekonomi

1. Mata Pencaharian Penduduk

Sesuai dengan data monografi di Desa Ngrundul bahwa berdasarkan pekerjaan atau mata pencaharian penduduk dapat dikomposisikan sebagai berikut :

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)
1	Pensiunan	55	44	99
2	Pegawai Negri Sipil	67	43	110
3	TNI	11	-	6
4	Kepolisian RI	9	-	9
5	Perdagangan	14	16	30
6	Petani/Pekebun	17	7	24
7	Peternak	2	1	3
8	Industri	2	1	3
9	Konstruksi	1	-	1
10	Karyawan Swasta	34	50	84
11	Karyawan BUMN	-	-	-
12	Karyawan BUMD	1	1	2
13	Karyawan Honorer	5	3	8
14	Buruh Harian Lepas	935	331	1.266
15	Buruh Tani/Perkebunan	423	-	423

16	Buruh Peternakan	1	-	1
17	Asisten Rumah Tangga	-	1	1
18	Tukang Jahit	-	1	1
19	Penata Rias	-	2	2
20	Mekanik	2	-	2
21	Seniman	1	1	2
22	Dosen	1	-	1
23	Guru	15	16	31
24	Konsultan	1	-	1
25	Bidan	-	4	4
26	Perawat	2	4	6
27	Sopir	9	-	9
28	Pedagang	28	27	55
29	Perangkat Desa	5	2	7
30	Kepala Desa	1	-	1
31	Wiraswasta	137	80	217
32	Lainnya	5	6	11
JUMLAH		1.784	636	2.420

Sumber Data Monografi Desa Ngrundul Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa Ngrundul bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan jumlah laki-laki dan perempuan yaitu 1.166 orang. Sedangkan jumlah dari keseluruhan tabel diatas belum tercantumkan bagi mereka yang masih berstatus Pelajar/Mahasiswa dan juga mereka yang Belum/Tidak Bekerja. Untuk itu di Desa

Ngrundul yang Belum/Tidak Bekerja (Laki-Laki 223 orang dan Perempuan 396 orang), sedangkan Pelajar/Mahasiswa (Laki-Laki 358 orang dan Perempuan 484 orang).

Rekapitulasi jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan di Desa Ngrundul yang sesuai dengan Data Monografi Desa Ngrundul tahun 2021 yang tercantum pada Tabel 2.5 diatas, sebagian besar penduduk desa yakni bekerja sebagai buruh harian lepas yakni sejumlah 1.266 jiwa dan juga Karyawan Swasta sejumlah 217 jiwa. Akan tetapi mulai masa Pandemi Covid-19 masuk di Indonesia, tidak sedikit juga penduduk Desa Ngrundul yang terkena dampak baik secara langsung maupun tidak langsung.

D. Kondisi Sosial

1. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spriritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat mengembangkan fungsi sosialnya. Berdasarkan Data Monografi Desa Ngrundul tahun 2021 jumlah KK yang ada di Desa Ngrundul yaitu 1.339 KK. Akan tetapi sangat disayangkan dan bahkan sampai saat ini di masa Pandemi Covid-19 ini juga belum ada stratifikasi terkait dengan Kepala Keluarga Prasejahtera, Sejahtera I – III, serta KK Sejahtera III plus.

Untuk di Desa Ngrundul sendiri juga sudah terdapat beberapa kelembagaan guna mendukung dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya seperti Poliklinik Desa(Polindes) dalam mendukung kesehatan masyarakat, kemudian ada juga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga(PKK), dalu dimasa Pandemi Covid-19 ini sudah ada Posko Gugus Tugas Covid-19, guna memberikan pelayanan yang mana sudah ada juga relawan-relawan desa, guna menampung berbagai aspirasi masyarakat ditengah Pandemi Covid-19 ini.

2. Budaya

Masyarakat Desa Ngrundul sebagian besar masih sangat memegang adat istiadat dan budaya nya. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya upacara untuk peringatan hari-hari besar seperti Nyasi Suro, Tahlilan, Mitoni, Rasullan, Midodareni, Sepasaran, Selapanan, Sadranan yang di lakukan dengan Kenduri. Akan tetapi dimasa Pandemi Covid-19 saat ini beberapa budaya tersebut mulai surut bukan berarti tidak ada yang melanjutkannya akan tetapi dengan alasan mengurangi kerumunan dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Seperti halnya Sadranan yang sudah 2 tahun terakhir sudah tidak dilakukan karena aturan Pemerintah Pusat hingga Desa yang belum memperbolehkannya.

E. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa atau juga disebut Pemdes merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah di tingkat desa, yang mana setiap desa sudah memiliki tujuan atau visi dan misi sendiri sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di wilayahnya. Berikut merupakan visi misi Desa Ngrundul :

Visi

Terbangunnya tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan bersih guma terwujudnya Desa Manjung yang maju, sejahtera, tentram dan berkeadilan.

Misi

Untuk mencapai visi tersebut kami upayakan melalui misi-misi sebagai berikut :

1. Melanjutkan program yang dilaksanakan Pemerintah Desa periode sebelumnya sebagaimana tercantum dalam RPJMDes Desa Manjung.
2. Melaksanakan konsolidasi internal, dalam upaya memperbaiki administrasi Pemerintah Desa di segala bidang.

3. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang transparan, bersih terbebas dari korupsi dan bentuk penyelewengan lainnya.
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberdayakan segala potensi yang ada di Desa Manjung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Awan. Rusfiana, Rudi, (2016) : *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung. ISBN.
- Abdul wahad, solichin (2016). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksar
- Adiputra, (2020). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah* . Vol 11 No 2 (2020). Jurnal: Univesitas Muhammadiyah Sinjai
- Laru, Ferdi, (2019). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*. Vol 8, No 4 (2019). JISIP.
- Nardin, Yulianus. (2019). *Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes* . Vol. 8 No. 3(2019). JISIP.
- Nugroho, Riant. (2017). *Public Policy*. Jakarta: Pt.Elex Media Komputindo. Buku: Public Policy
- Palulungan, Lusia. dkk, (2019). *Mengubah Kebijakan Publik di Desa*. Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia. BaKTI.
- Tyas, Wido Prananing, dkk (2020). *Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Rumah (Home-Based Enterprises/HBE)* . Vol 8, No 1, 2020. Jurnal Pengembangan Kota
- Utami, Adelia. dkk, (2019). *Hubungan Peran Pendamping dengan Partisipasi Pelaku Industri Rumahan dalam Program Pemberdayaan Perempuan*. VOL. 15 NO. 1 (2019). Jurnal Penyuluhan IPB
- Octavian AR, M. Oki (2019) *Analisis Pengaruh Strategi Bersaing Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan
- Maftrohah, Aini (2019) *Efektivitas Sentra Usaha Rumahan (Home Industri) Pengolahan Ikan Asap Didesa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Sebagai Upaya Pemerdayaan Ekonomi Masyarakat*. Skripsi.Yogyakarta : Uin Sunan Kalijaga
- Miftah, Thoha, 2012, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta :Graha Ilmu
- Huda, Miftahul.2015. *Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran*. Yogyakarta.Pustaka Belajar,hal.197-199

Huda, Miftahul.2015. Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran. Yogyakarta.Pustaka Belajar,hal.197-199

Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa